

Daftar Pustaka

- Akbar, Bahrullah. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Konsep & Teori. Jakarta: Bumi Metro Raya, Hal 49-125
- Algameta, Maulia Fasha. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia
- Attila, G. (2012). Agency problems in public sector. *Annals of Faculty of Economics*, Vol. 1, No. 1, pp. 708 - 712
- Badan Pemeriksaan Keuangan. 2016. Indeks Hasil Pemeriksaan Semester I. Jakarta
- Damiati dan Rini. 2016. Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 4(1). 2017, pp 1-18
- Elder, Randal J., Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, Amir Abadi Jusuf (2011). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat, Hal 316 – 317
- Ferraz, Claudio dan Finan, Frederico. 2011. *Electoral Accountability and Corruption : Evidence from the Audits Of Local Governments*
- FE-UNJ. 2012. *Pedoman Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Halim, A, & Abdullah, S.2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 53 – 54
- Halim, A, & Kusufi, Muhammad Syam. 2013. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat, Hal 370
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Ombak, Hal 62 - 63
- Harahap, Krisna. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Grafitri, Hal 1

- Hartanti, Evi. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika,. Hal 9 - 10
- Heriningsing dan Marita. 2013. Pengaruh opini audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi Vol 11 Bo. 1
- Heriningsih, Sucahyo. 2014. Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia. Paradigma: Jurnal Masalah sosial, Politik dan Kebijakan, 18(2). pp. 29-40 ISSN 1410-3133
- Husna, Nurul dan Sri Rahayu. 2017. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerinth Daerah di Indonesia Tahun 2016). e-Proceeding of Management: Vol.4, No,2 Agustus 2017 page 1637. ISSN 2355-9357
- Jensen, M dan W.H Meckling. 1976. Theory The Firm: Managerial Behavior Agency Cost And Ownership Structure. Journal Of Financial Econimics 3. Hal 305 – 360
- Keputusan BPK RI No 5/K/I-XIII.2/8/2010 Tentang Petunjuk Teknis Koding Temuan Pemeriksaan
- Khairudin dan Erlanda. 2016. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol. 7, No.2, September 2016 Hal 137-154
- Klitgaard, Rober. 2005. Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal 31
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015. Jakarta
- KPK. 2016. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2004 – 2015. (<https://acch.kpk.go.id>) tanggal akses 30 April 2017
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Hal 82

- Lamo, Achmad Said. 2015. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance: Manajemen Pertanggungjawaban Sosial Yogyakarta : Depublish, Hal 102
- Liu, J. and Lin B. 2012. Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. China Journal of Accounting Research, Vol. 5. Hal. 163-186
- Mahatmyo, Atyanto. 2014. Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar. Yogyakarta: Deepublish, Hal 94
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi, Hal 20 193
- Maysitoh, Wardhani dan Setyaningrum. 2015. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Poycarpus, Rudy. 2016 Pemerintah Daerah Jadi Episentrum Kasus Korupsi. (<http://mediaindonesia.com>) diakses pada tanggal 29 April 2017
- Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta: MediaKom, Hal 61-87
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi (Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective). Fokus Ekonomi Vol. 2 No. 1 Juni 2007, Hal 37-46
- Rai, I Gusti Agung. 2008. Akuntansi Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, Hal 29-33, 179
- Rep-Humas Setda Prov. Jabar. 2016. Kelima Kalinya Jabar Raih WTP. (www.jabarprov.go.id) tanggal akses 29 April 2017

- Rini dan Sarah. 2014. Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Etikonomi* Vol. 13 No. 1
- Saputra, Bambang. 2012. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Korupsi di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator* Volume 9 No.3
- Sari, Adelia Pramita dan Martani, Dwi. 2015. Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit Melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. Hal 430
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Hal 7
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, Hal 15-96
- Suswinarno. 2013. *Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia, Hal 154
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persana, Hal 143
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang – Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Yuliyana dan Setyaningrum. 2016. Pengaruh Penerapan E-Government Dan Akuntabilitas Terhadap Persepsi Korupsi Di Kementerian/Lembaga. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung 2016

Zuhrawaty. 2009. Panduan dan Kiat Sukses Menjadi Auditor ISO 9001. Yogyakarta: Media Pressindo, Hal 5